



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2017-2021



**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2017 - 2021**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2016-2021 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran Target Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepala Dinas
Drs. H. Muhammad Syaifuddin
Pembina Utama Muda/IV C
NIP 19590808 199303 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara.....	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara	20
BAB 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
4.1 Visi dan Misi Dinas	40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan	46
BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	48



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

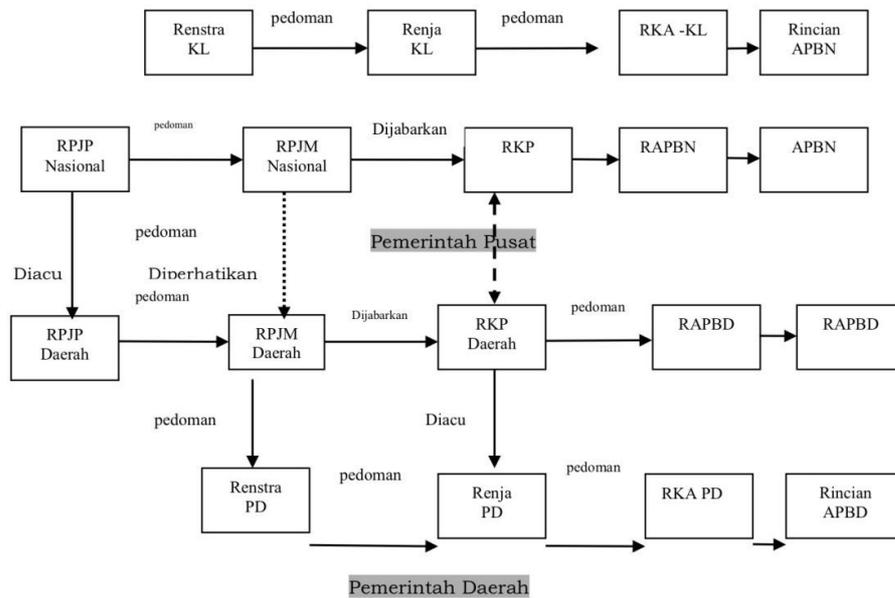
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan
6. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya dua tahun terakhir mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 milik Bagian Pertanian Sekretariat Daerah dan Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengaju pada Perubahan Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar I.I
Bagian Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodir dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;



14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tujuan pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :



- Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
- Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
- Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.



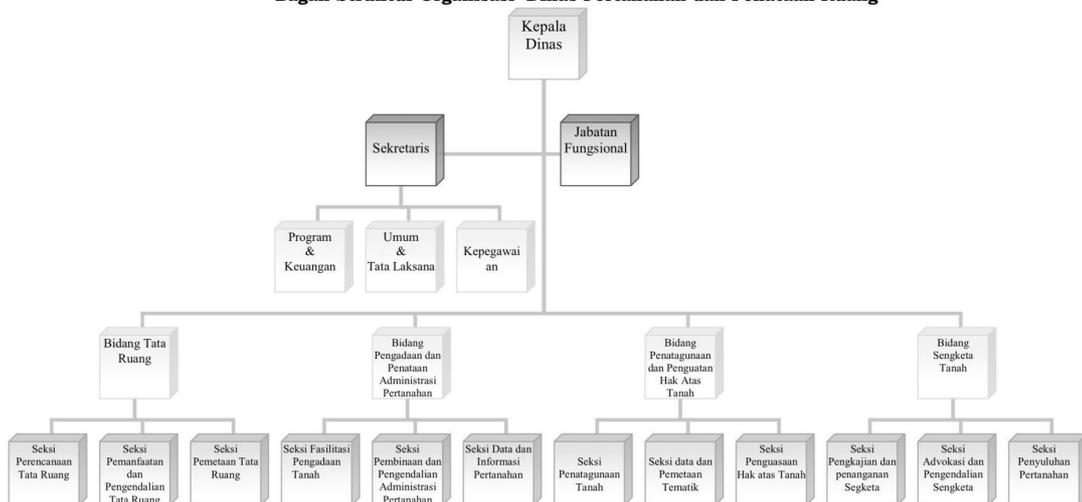
- Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
- Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
- Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.



- Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
- Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
- Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

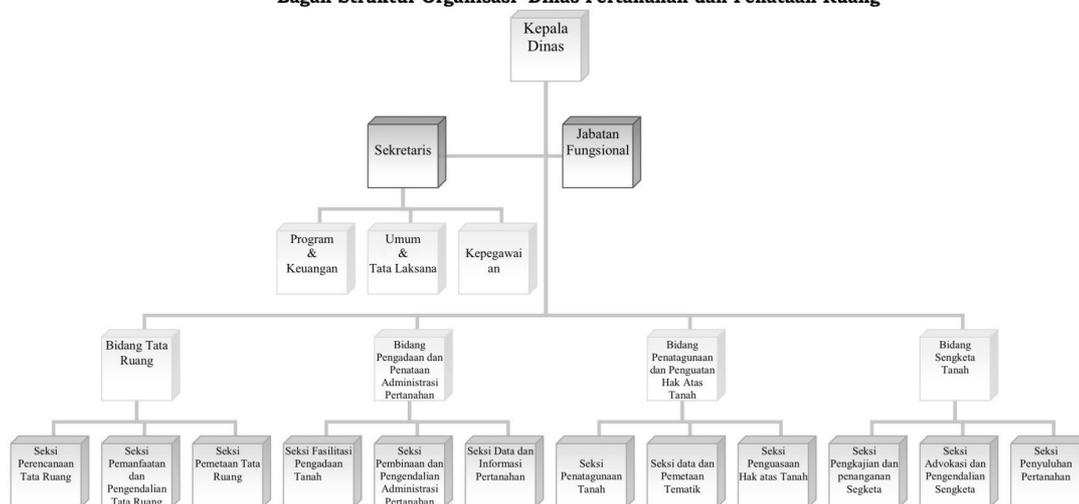


Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



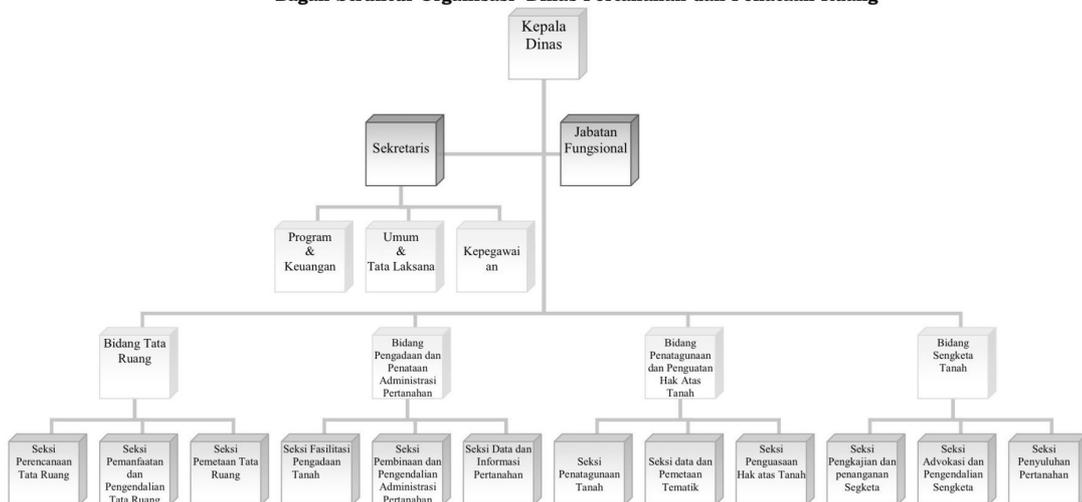


Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang





Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang





2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2018

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Aparatur Sipil Negara	78	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	55	41,36
	Jumlah	133	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan

Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 18 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar berdasarkan jabatan Tahun 2018

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Esselon II	1	1,29
2.	Esselon III	5	6,41
3.	Esselon IV	12	16,00
4.	Fungsional	1	1,29
5.	Staf	59	75,65
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2018

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Aparatur Sipil Negara	78	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	55	41,36
	Jumlah	133	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan

Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 18 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar berdasarkan jabatan Tahun 2018

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Esselon II	1	1,29
2.	Esselon III	5	6,41
3.	Esselon IV	12	16,00
4.	Fungsional	1	1,29
5.	Staf	59	75,65
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2018

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Aparatur Sipil Negara	78	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	55	41,36
	Jumlah	133	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan

Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 18 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar berdasarkan jabatan Tahun 2018

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Esselon II	1	1,29
2.	Esselon III	5	6,41
3.	Esselon IV	12	16,00
4.	Fungsional	1	1,29
5.	Staf	59	75,65
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 78 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,75% yang berstatus golongan II, 52,58 % golongan III, dan 7,71% golongan IV.

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Golongan / Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Golongan IV / Pembina		
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	1,29
	- Pembina Tingkat I / IV b	3	3,85
	- Pembina / IV a	2	2,57
2.	Golongan III		
	- Penata Tingkat I / III d	11	14,11
	- Penata / III c	10	12,82
	- Penata Muda TK.I / III b	14	17,95
	- Penata Muda / III a	6	7,70
3.	Golongan II		
	- Pengatur Tingkat I / II d	5	6,41
	- Pengatur / II c	13	16,67
	- Pengatur Muda TK.I / II b	9	11,54
	- Pengatur Muda / II a	4	5,13
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 78 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,75% yang berstatus golongan II, 52,58 % golongan III, dan 7,71% golongan IV.

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Golongan / Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Golongan IV / Pembina		
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	1,29
	- Pembina Tingkat I / IV b	3	3,85
	- Pembina / IV a	2	2,57
2.	Golongan III		
	- Penata Tingkat I / III d	11	14,11
	- Penata / III c	10	12,82
	- Penata Muda TK.I / III b	14	17,95
	- Penata Muda / III a	6	7,70
3.	Golongan II		
	- Pengatur Tingkat I / II d	5	6,41
	- Pengatur / II c	13	16,67
	- Pengatur Muda TK.I / II b	9	11,54
	- Pengatur Muda / II a	4	5,13
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 78 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,75% yang berstatus golongan II, 52,58 % golongan III, dan 7,71% golongan IV.

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Golongan / Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Golongan IV / Pembina		
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	1,29
	- Pembina Tingkat I / IV b	3	3,85
	- Pembina / IV a	2	2,57
2.	Golongan III		
	- Penata Tingkat I / III d	11	14,11
	- Penata / III c	10	12,82
	- Penata Muda TK.I / III b	14	17,95
	- Penata Muda / III a	6	7,70
3.	Golongan II		
	- Pengatur Tingkat I / II d	5	6,41
	- Pengatur / II c	13	16,67
	- Pengatur Muda TK.I / II b	9	11,54
	- Pengatur Muda / II a	4	5,13
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018



c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata – I lebih mendominasi yaitu sebesar 43.59 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	10	12,82
2.	Strata I (SI)	34	43,59
3.	Diploma IV	1	1,29
4.	Sarjana Muda (D3)	2	2,60
5.	SLTA	29	37,18
6.	SLTP	2	2,57
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tingkat pendidikan Strata I juga paling banyak yaitu sekitar 49,09 %.

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	1	1,82
2.	Strata I (SI)	24	43,64
3.	Diploma IV	-	-
4.	Sarjana Muda (D3)	1	1,82
5.	SLTA	27	49,09
6.	SLTP	2	3,64
	Jumlah	55	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata – I lebih mendominasi yaitu sebesar 43.59 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	10	12,82
2.	Strata I (SI)	34	43,59
3.	Diploma IV	1	1,29
4.	Sarjana Muda (D3)	2	2,60
5.	SLTA	29	37,18
6.	SLTP	2	2,57
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tingkat pendidikan Strata I juga paling banyak yaitu sekitar 49,09 %.

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	1	1,82
2.	Strata I (SI)	24	43,64
3.	Diploma IV	-	-
4.	Sarjana Muda (D3)	1	1,82
5.	SLTA	27	49,09
6.	SLTP	2	3,64
	Jumlah	55	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata – I lebih mendominasi yaitu sebesar 43.59 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	10	12,82
2.	Strata I (SI)	34	43,59
3.	Diploma IV	1	1,29
4.	Sarjana Muda (D3)	2	2,60
5.	SLTA	29	37,18
6.	SLTP	2	2,57
	Jumlah	78	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tingkat pendidikan Strata I juga paling banyak yaitu sekitar 49,09 %.

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	1	1,82
2.	Strata I (SI)	24	43,64
3.	Diploma IV	-	-
4.	Sarjana Muda (D3)	1	1,82
5.	SLTA	27	49,09
6.	SLTP	2	3,64
	Jumlah	55	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Adapun jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	2017	Rp 11.586.231.717,97	Rp 7.925.046.783,96
2.	2018	Rp 15.519.513.083,21	Rp -
	Total	Rp 27.105.744.801,18	Rp 7.925.046.783,96

Sumber : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPPR 2017 & 2018

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terbilang sangat minim. Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Sarana dan Prasarana sementara yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2017 adalah milik Sekretariat daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebelum Perangkat Daerah ini terbentuk.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Tanah)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.558	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB A)



Adapun jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	2017	Rp 11.586.231.717,97	Rp 7.925.046.783,96
2.	2018	Rp 15.519.513.083,21	Rp -
	Total	Rp 27.105.744.801,18	Rp 7.925.046.783,96

Sumber : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPPR 2017 & 2018

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terbilang sangat minim. Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Sarana dan Prasarana sementara yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2017 adalah milik Sekretariat daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebelum Perangkat Daerah ini terbentuk.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Tanah)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.558	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB A)



Adapun jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	2017	Rp 11.586.231.717,97	Rp 7.925.046.783,96
2.	2018	Rp 15.519.513.083,21	Rp -
	Total	Rp 27.105.744.801,18	Rp 7.925.046.783,96

Sumber : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPPR 2017 & 2018

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terbilang sangat minim. Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Sarana dan Prasarana sementara yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2017 adalah milik Sekretariat daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebelum Perangkat Daerah ini terbentuk.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Tanah)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.558	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB A)



Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, berupa tanah aset tanah bangunan kantor pemerintah dengan status hak pakai, tahun pengadaan 2005 yang dinilai oleh PT Hutama Karya. Sebelum digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tanah Bangunan ini dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Tabel 2.7 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Gedung dan Bangunan)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Bangunan Gedung Kantor permanen	1600	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
2.	Bangunan Gedung Kantor permanen	3240000	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
4.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
5.	Bangunan Lain-lain	88	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
6.	Bangunan Lain-lain	326	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
7.	Bangunan Lain-lain	200	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB C)

Aset sarana tempat kerja di atas, terdiri dari Kantor Dinas seluas 216 M², kantor 2 seluas 259 M², pagar keliling 120 M², pagar Depan 75 M² dan Jalan 1125 M². bangunan lain-lain berupa kontruksi/pembelian bangunan lainnya (rumah genset), pembuatan taman kantor dan pemasangan paving blok dan teras kantor.

Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini :



Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, berupa tanah aset tanah bangunan kantor pemerintah dengan status hak pakai, tahun pengadaan 2005 yang dinilai oleh PT Hutama Karya. Sebelum digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tanah Bangunan ini dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Tabel 2.7 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Gedung dan Bangunan)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Bangunan Gedung Kantor permanen	1600	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
2.	Bangunan Gedung Kantor permanen	3240000	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
4.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
5.	Bangunan Lain-lain	88	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
6.	Bangunan Lain-lain	326	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
7.	Bangunan Lain-lain	200	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB C)

Aset sarana tempat kerja di atas, terdiri dari Kantor Dinas seluas 216 M², kantor 2 seluas 259 M², pagar keliling 120 M², pagar Depan 75 M² dan Jalan 1125 M². bangunan lain-lain berupa kontruksi/pembelian bangunan lainnya (rumah genset), pembuatan taman kantor dan pemasangan paving blok dan teras kantor.

Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini :



Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, berupa tanah aset tanah bangunan kantor pemerintah dengan status hak pakai, tahun pengadaan 2005 yang dinilai oleh PT Hutama Karya. Sebelum digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tanah Bangunan ini dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Tabel 2.7 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Gedung dan Bangunan)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Bangunan Gedung Kantor permanen	1600	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
2.	Bangunan Gedung Kantor permanen	3240000	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
4.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
5.	Bangunan Lain-lain	88	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
6.	Bangunan Lain-lain	326	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
7.	Bangunan Lain-lain	200	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB C)

Aset sarana tempat kerja di atas, terdiri dari Kantor Dinas seluas 216 M², kantor 2 seluas 259 M², pagar keliling 120 M², pagar Depan 75 M² dan Jalan 1125 M². bangunan lain-lain berupa kontruksi/pembelian bangunan lainnya (rumah genset), pembuatan taman kantor dan pemasangan paving blok dan teras kantor.

Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	4
2.	Staion Wagon	Unit	2
3.	Mini Bus	Unit	1
4.	Meja Tambahan	Unit	2
5.	Kursi Rapat	Unit	6
6.	Sofa	Unit	1
7.	Meja Kerja Pejabat Ess II	Unit	1
8.	Meja Kerja Pejabat Ess III	Unit	1
9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	3
10.	Kursi Kerja pejabat Ess IV	Unit	3
11.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	18
12.	Meja Biro	Unit	65
13.	Lemari Kayu	Unit	6
14.	Lemari Besi	Unit	1
15.	Lemari Arsip	Unit	5
16.	Filling Besi/Metal	Unit	1
17.	Band Kas	Unit	1
18.	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2
19.	Papan Nama Instansi	Unit	2
20.	Moubiler Laiinya	Unit	3
21.	Note Book	Unit	22
22.	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
23.	Personal Komputer	Unit	11
24.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1
25.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
26.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	1
27.	Hard Disk	Unit	10
28.	Printer	Unit	12
29.	Scanner	Unit	2
30.	Slide Projector	Unit	1
31.	Global Positioning System	Unit	17
32.	Alat Ukur Metaran	Unit	19



Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	4
2.	Staion Wagon	Unit	2
3.	Mini Bus	Unit	1
4.	Meja Tambahan	Unit	2
5.	Kursi Rapat	Unit	6
6.	Sofa	Unit	1
7.	Meja Kerja Pejabat Ess II	Unit	1
8.	Meja Kerja Pejabat Ess III	Unit	1
9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	3
10.	Kursi Kerja pejabat Ess IV	Unit	3
11.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	18
12.	Meja Biro	Unit	65
13.	Lemari Kayu	Unit	6
14.	Lemari Besi	Unit	1
15.	Lemari Arsip	Unit	5
16.	Filling Besi/Metal	Unit	1
17.	Band Kas	Unit	1
18.	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2
19.	Papan Nama Instansi	Unit	2
20.	Moubiler Laiinya	Unit	3
21.	Note Book	Unit	22
22.	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
23.	Personal Komputer	Unit	11
24.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1
25.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
26.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	1
27.	Hard Disk	Unit	10
28.	Printer	Unit	12
29.	Scanner	Unit	2
30.	Slide Projector	Unit	1
31.	Global Positioning System	Unit	17
32.	Alat Ukur Metaran	Unit	19



Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	4
2.	Staion Wagon	Unit	2
3.	Mini Bus	Unit	1
4.	Meja Tambahan	Unit	2
5.	Kursi Rapat	Unit	6
6.	Sofa	Unit	1
7.	Meja Kerja Pejabat Ess II	Unit	1
8.	Meja Kerja Pejabat Ess III	Unit	1
9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	3
10.	Kursi Kerja pejabat Ess IV	Unit	3
11.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	18
12.	Meja Biro	Unit	65
13.	Lemari Kayu	Unit	6
14.	Lemari Besi	Unit	1
15.	Lemari Arsip	Unit	5
16.	Filling Besi/Metal	Unit	1
17.	Band Kas	Unit	1
18.	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2
19.	Papan Nama Instansi	Unit	2
20.	Moubiler Laiinya	Unit	3
21.	Note Book	Unit	22
22.	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
23.	Personal Komputer	Unit	11
24.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1
25.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
26.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	1
27.	Hard Disk	Unit	10
28.	Printer	Unit	12
29.	Scanner	Unit	2
30.	Slide Projector	Unit	1
31.	Global Positioning System	Unit	17
32.	Alat Ukur Metaran	Unit	19



No	Uraian	Satuan	Jumlah
33.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	4
34.	Monitor	Unit	1
35.	Tustel	Unit	7
36.	HandyCam	Unit	2
37.	Video Camera dan Recorder	Unit	5
38.	Plotter	Unit	1
39.	Camera Elektronik	Unit	4
40.	CCTV	Unit	3
41.	Theodolt	Unit	1
42.	Kompas	Unit	5
43.	Air Conditioning Unit	Unit	1
44.	AC Split	Unit	5
45.	Tangga Aluminium	Unit	1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	1
47.	Dispenser	Unit	1
48.	Televisi	Unit	3
49.	Lemari Pendingin	Unit	1
50.	Gorden	Pasang	2
51.	Karpet	Roll	1
52.	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	4
53.	Bola Api	Unit	6
54.	Wireless Amplifier	Unit	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang ingin dicapai disesuaikan dengan Indikator kinerja yaitu yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



No	Uraian	Satuan	Jumlah
33.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	4
34.	Monitor	Unit	1
35.	Tustel	Unit	7
36.	HandyCam	Unit	2
37.	Video Camera dan Recorder	Unit	5
38.	Plotter	Unit	1
39.	Camera Elektronik	Unit	4
40.	CCTV	Unit	3
41.	Theodolt	Unit	1
42.	Kompas	Unit	5
43.	Air Conditioning Unit	Unit	1
44.	AC Split	Unit	5
45.	Tangga Aluminium	Unit	1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	1
47.	Dispenser	Unit	1
48.	Televisi	Unit	3
49.	Lemari Pendingin	Unit	1
50.	Gorden	Pasang	2
51.	Karpet	Roll	1
52.	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	4
53.	Bola Api	Unit	6
54.	Wireless Amplifier	Unit	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang ingin dicapai disesuaikan dengan Indikator kinerja yaitu yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



No	Uraian	Satuan	Jumlah
33.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	4
34.	Monitor	Unit	1
35.	Tustel	Unit	7
36.	HandyCam	Unit	2
37.	Video Camera dan Recorder	Unit	5
38.	Plotter	Unit	1
39.	Camera Elektronik	Unit	4
40.	CCTV	Unit	3
41.	Theodolt	Unit	1
42.	Kompas	Unit	5
43.	Air Conditioning Unit	Unit	1
44.	AC Split	Unit	5
45.	Tangga Aluminium	Unit	1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	1
47.	Dispenser	Unit	1
48.	Televisi	Unit	3
49.	Lemari Pendingin	Unit	1
50.	Gorden	Pasang	2
51.	Karpet	Roll	1
52.	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	4
53.	Bola Api	Unit	6
54.	Wireless Amplifier	Unit	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang ingin dicapai disesuaikan dengan Indikator kinerja yaitu yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Adapun pencapaian kinerja bagian pertanahan dan bagian Tata Ruang sebelum bergabung menjadi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 2.9:



Adapun pencapaian kinerja bagian pertanahan dan bagian Tata Ruang sebelum bergabung menjadi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 2.9:



Adapun pencapaian kinerja bagian pertanahan dan bagian Tata Ruang sebelum bergabung menjadi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 2.9:



Tabel T-C 2.3: Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara 2013-2017 :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target SKPD Tahun	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas lahan bersertifikat					-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	8,4	
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					-	-	-	-	-	-	-	-	64,29	-	-	-	-	64,29	
3.	Penyelesaian Izin Lokasi					-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
4.	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB					-	-	-	-	-	-	-	-	41,31	-	-	-	-	41,31	
5.	Keberadaan Perda RTRW (Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang)			Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR		-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	-	ada	



Tabel T-C 2.3: Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara 2013-2017 :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target SKPD Tahun	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas lahan bersertifikat					-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	8,4	
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					-	-	-	-	-	-	-	-	64,29	-	-	-	-	64,29	
3.	Penyelesaian Izin Lokasi					-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
4.	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB					-	-	-	-	-	-	-	-	41,31	-	-	-	-	41,31	
5.	Keberadaan Perda RTRW (Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang)			Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR		-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	-	ada	



Tabel T-C 2.3: Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara 2013-2017 :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target SKPD Tahun	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas lahan bersertifikat					-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	8,4	
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					-	-	-	-	-	-	-	-	64,29	-	-	-	-	64,29	
3.	Penyelesaian Izin Lokasi					-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
4.	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB					-	-	-	-	-	-	-	-	41,31	-	-	-	-	41,31	
5.	Keberadaan Perda RTRW (Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang)			Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR		-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	-	ada	



Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2013-2017

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	867.977.272,33	-	-	-	-	844.875.125	-	-	-	-	97,33	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	34.525.651,00	-	-	-	-	34.518.100	-	-	-	-	99,97	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	-	-	-	-	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	490.295.916,05	-	-	-	-	203.670.350	-	-	-	-	41,54	-	-



Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2013-2017

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	867.977.272,33	-	-	-	-	844.875.125	-	-	-	-	97,33	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	34.525.651,00	-	-	-	-	34.518.100	-	-	-	-	99,97	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	-	-	-	-	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	490.295.916,05	-	-	-	-	203.670.350	-	-	-	-	41,54	-	-



Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2013-2017

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	867.977.272,33	-	-	-	-	844.875.125	-	-	-	-	97,33	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	34.525.651,00	-	-	-	-	34.518.100	-	-	-	-	99,97	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	-	-	-	-	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	490.295.916,05	-	-	-	-	203.670.350	-	-	-	-	41,54	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara harus dengan sigap mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Sedangkan *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapun masing-masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. *Strength (Kekuatan)*

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara harus dengan sigap mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Sedangkan *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapun masing-masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. *Strength (Kekuatan)*

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara harus dengan sigap mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Sedangkan *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapun masing-masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. *Strength (Kekuatan)*

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.



- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.
- Sumber Daya Manusia
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

b. Weakness (Kelemahan)

- Terbatasnya/belum adanya Rencana Tata Ruang rinci (RDTR);
- Konsistensi terhadap perencanaan Penataan Ruang;
- Terbatasnya peta-peta tematik penunjang ke tata ruangan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
- Belum tersedianya sistem informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai;
- Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan;
- Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional).

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Keterbukaan informasi public (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).



- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.
- Sumber Daya Manusia
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

b. Weakness (Kelemahan)

- Terbatasnya/belum adanya Rencana Tata Ruang rinci (RDTR);
- Konsistensi terhadap perencanaan Penataan Ruang;
- Terbatasnya peta-peta tematik penunjang ke tata ruangan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
- Belum tersedianya sistem informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai;
- Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan;
- Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional).

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penatan Ruang;
- Keterbukaan informasi public (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).



- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.
- Sumber Daya Manusia
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

b. Weakness (Kelemahan)

- Terbatasnya/belum adanya Rencana Tata Ruang rinci (RDTR);
- Konsistensi terhadap perencanaan Penataan Ruang;
- Terbatasnya peta-peta tematik penunjang ke tata ruangan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
- Belum tersedianya sistem informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai;
- Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan;
- Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional).

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Adanya kerjasama Pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Keterbukaan informasi public (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).



b. Threats (Ancaman)

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
- Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum terpolanya jaringan Infrastruktur dalam pengembangan wilayah.



b. Threats (Ancaman)

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
- Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum terpolanya jaringan Infrastruktur dalam pengembangan wilayah.



b. Threats (Ancaman)

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
- Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum terpolanya jaringan Infrastruktur dalam pengembangan wilayah.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, dan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, selain bahwa menggabungkan dua fungsi yang berbeda menjadi satu tupoksi yang selaras memerlukan penyesuaian ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan yang belum disajikan secara konseptual dan strategis;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Belum optimalnya kontrol dalam pemanfaatan ruang;
4. Permasalahan dalam hal Pembebasan Lahan;
5. Data-data dan informasi pertanahan yang belum terakomodir dengan baik;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah;



7. Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan public secara berkualitas;
9. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelayanan secara berkualitas.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam tabel T-B.35 dibawah ini :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyusunan Perencanaan yang belum strategis dan konseptual	Lemahnya Perencanaan	Penyamaan persepsi dan kurangnya kordinasi mengenai sasaran strategis yang tidak dipahami bersama
2.	Data dan informasi pendukung yang tidak lengkap	Tidak terpusatnya data mengenai pertanahan dan tata ruang	Sistem pengendalian internal yang lemah
3.	Lemahnya kontrol tentang dan pemanfaatan ruang	Kekuatan hukum atas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang rendah	Belum memiliki Perda tentang RDTR
4.	Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung	Tidak di dukung oleh sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran
5.	Rendahnya kualitas SDM	Kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya bimbingan dan pelatihan tim teknis

3.2. **Telahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 , pada BAB IV mengenai Visi dan Misi pasal 6 disebutkan visi dan misi Kepala Daerah yang juga menjadi visi dan misi RPJMD, yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan”

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

❖ **MAJU:**

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan



publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

❖ **MANDIRI:**

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

❖ **SEJAHTERA :**

Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

❖ **BERKEADILAN :**

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan *gender* serta perlindungan anak.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. Pencapaian Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat

Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan Tranparansi & Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

2. Meningkatkan pelayanan Administrasi Pertanahan

Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan

2. Pencapaian Misi V : Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah

Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang



Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 harus memperhatikan Renstra Kementerian/lembaga terkait. Tujuannya agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sejalan dengan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya ruang yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan;
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa,konflik,dan perkara);

Adapun arah kebijakan dan strategis Kementerian dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1 : Arah kebijakan dan strategi kementerian

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementerian
1.	Penataan Ruang	- Mewujudkan Nawa Cita (Pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi,dsb); - Penyusunan norma,standar,pedoman, dan



		<p>criteria (NSPK) bidang Penataan Ruang;</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional ;- Rencana Detail Tata Ruang,- Fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000- Pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.
2.	Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">- Penyiapan peta dasar skala besar;- Pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 ha (18 juta bidang);- Integrasi tata batas kawasan hutan ke system pendaftaran tanah;- Sosialisasi tanah adat/ulayat;- Peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi;- Penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.
3.	Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Program Nasional Agraria ;- Percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 titik;- Pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan social dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.
4.	Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none">- Perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada Tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi asset yang subyeknya memenuhi syarat;- IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung
5.	Pengadaan Tanah	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Workshop antar Kementrian/Lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin



6.	Penanganan Sengketa	terjadi. - Penyiapan model-model penanganan sengketa; - Inisiasi peradilan pertanahan; - Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan; - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.
7.	Pengorganisasian dan Sumber Daya	- Optimalisasi STPN dan kerjasama Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan Pendidikan Khusus yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi. - Penataan SDM sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kebijakan Monatorium penerimaan PNS; - Updating database pegawai; - Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pola dan system yang tepat antara lain Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan Tinggi Pertanahan.
8.	Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali Mutu	- Tindak lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan kinerja lembaga; - Penerapan system pengendalian intern secara kontinu dan konsisten; - Mempertahankan opini Lapora Keuangan; - Penilaian kinerja dalam rangka pemberian penghargaan dan saknsi bagi penanggungjawab program dan kegiatan.

Sumber: Rencana Strategis Kementrian Agraria/BPN dan Tata Ruang Tahun 2015-2019

3.3.2 Telahaan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 tentunya harus sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Penyusunan RPJMD



Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 tidak terlepas dari visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim tahun 2013-2018 adalah : “Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah daerah, antara lain :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan memanfaatkan potensi pertambangan, minyak dan gas (MIGAS), untuk mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua



puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah sebagai berikut :

1. Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
2. Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
3. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
4. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
5. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
6. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
7. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berisi penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi antara lain sebagai dasar untuk menyusun rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Sebagai turunan dari rumusan kebijakan penataan ruang yang dijabarkan secara lebih operasional, maka strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi :
 1. Memantapkan kedudukan kabupaten sebagai kawasan andalan;
 2. Memantapkan fungsi kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
 3. Menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;



4. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 5. Meningkatkan sarana dan prasarana mendukung pengembangan kegiatan.
- b) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dengan strategi meliputi :
1. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 2. Meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 3. Mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 4. Mengembangkan system pemasaran hasil pertanian.
- c) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
1. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 3. Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
 4. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- d) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi :
1. Mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. Meningkatkan system prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 3. Menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 4. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 5. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 6. Meningkatkan ketersediaan system prasarana pengelolaan lingkungan.
- e) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:



1. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 2. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 3. Mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 4. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- f) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
1. Meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 2. Mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 3. Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 4. Mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 5. Meningkatkan produktifitas dan komoditas unggulan.
- g) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi :
1. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 2. Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 3. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
 4. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
 5. Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.
- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan Negara dengan strategi meliputi :
1. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertanahan dan keamanan Negara;
 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis dengan fungsi pertanahan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus



pertanahan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun; dan

4. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertanahan dan keamanan.

Selanjutnya dijelaskan Rencana Struktur Ruang meliputi : (1) Rencana Sistem Perkotaan, (2) Rencana Sistem Pedesaan, dan (3) Jaringan Prasarana Wilayah.

Rencana sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah Rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Tabel 3.2 : Sistem dan Fungsi Perkotaan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	<ul style="list-style-type: none">- Pusat pengelolaan Migas- Pusat pengelolaan Batu Bara- Pusat Pemerintahan Kabupaten- Pusat Perdagangan Regional- Pusat Koleksi dan distribusi barang regional- Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Bangun	Sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Tenggarong
		Muara Badak	Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Samarinda
		Muara Jawa	Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Samarinda dan PKN Balikpapan
		Kembang Janggut	Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Long Pahangai
		Samboja	<ul style="list-style-type: none">- Pusat pelayanan perkotaan- Pusat transportasi regional dan local- Pusat pengembangan



			<ul style="list-style-type: none"> pertanian - Pusat pelayanan pariwisata - Pusat pelayanan industry dan jasa perdagangan terbatas
			-
		Tenggarong Seberang	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pelayanan perkotaan - Pusat transportasi regional dan local - Pusat pengembangan pertanian - Pusat pelayanan pariwisata - Pusat pelayanan industry dan jasa
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sanga-sanga Loa Janan Loa Kulu Muara Muntai Muara Wis Sebulu Anggana Marang Kayu Muara Kaman Kenohan Tabang	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pelayanan perkotaan - Pusat transportasi antar kecamatan dan/atau local kecamatan - Pusat produksi dan pengelolahan hasil pertanian - Pusat kegiatan perikanan - Pusat pengembangan industry, dan - Pusat pelayanan jasa dan perdagangan lokal

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2031

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan pusat kota. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan 1 (satu) atau 3 (Tiga) desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan bagi desa sekitarnya dengan fungsi pelayanan kegiatan antar lingkungan dan antar desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. Kecamatan Kota Bangun berada di Desa Kota Bangun Ulu
- b. Kecamatan Muara Badak berada di Desa Badak Baru.



- c. Kecamatan Kembang Janggut meliputi :
 - 1. Desa Hambau ; dan
 - 2. Desa Long Beleh Haloq .
- d. Kecamatan Samboja meliputi :
 - 1. Desa Bringin Agung ; dan
 - 2. Desa Bukit Raya.
- e. Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo.
- f. Kecamatan Loa Janan meliputi :
 - 1. Desa Loa Janan Ulu ; dan
 - 2. Desa Loa Duri Ilir.
- g. Kecamatan Loa Kulu meliputi :
 - 1. Desa Loa Kulu Kota ;
 - 2. Desa Loa Sumber ; dan
 - 3. Desa Jembayan.
- h. Kecamatan Muara Muntai meliputi :
 - 1. Desa Perian ;
 - 2. Desa Muara Muntai Ulu ; dan
 - 3. Desa Jantur Selatan.
- i. Kecamatan Muara Wis meliputi :
 - 1. Desa Muara Wis ; dan
 - 2. Desa Melintang.
- j. Kecamatan Sebulu meliputi :
 - 1. Desa Sumber Sari ;
 - 2. Desa Sebulu Ulu ; dan
 - 3. Desa Menunggal Daya.
- k. Kecamatan Anggana berada di Kelurahan Sungai Meriam.
- l. Kecamatan Marang Kayu meliputi :
 - 1. Desa Sebuntal ; dan
 - 2. Desa Santan Ulu.
- m. Kecamatan Muara Kaman meliputi :
 - 1. Desa Sidomukti ;
 - 2. Desa Bunga Jadi ; dan
 - 3. Desa Panca Jaya.
- n. Kecamatan Kenohan meliputi :
 - 1. Desa Tuana Tuha ; dan
 - 2. Desa Kahala.



o. Kecamatan Tabang berada di Desa Sidomulyo.

Adapun Fungsi pelayanan yang akan diemban oleh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ini diantaranya :1. Pusat pelayanan perdesaan, 2.Pusat transportasi antar Desa ;3. Pusat pelayanan permukiman perdesaan.

Dijelaskan pula rencana system jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari :

1. Rencana system prasarana utama terdiri atas :
 - a. Rencana jaringan transportasi darat ;
 - b. Rencana jaringan perkeretaapian ;
 - c. Rencana jaringan transportasi laut ; dan
 - d. Rencana jaringan transportasi udara.
2. Rencana pengembangan prasarana lainnya, meliputi :
 - a. Rencana jaringan energy ;
 - b. Rencana jaringan telekomunikasi ;
 - c. Rencana jaringan sumber daya air ; dan
 - d. Rencana jaringan pengelolaan lingkungan yang mencakup prasarana lingkungan, seperti rencana jaringan pengelolaan persampahan, rencana jaringan air minum, rencana jaringan jalur dan evakuasi bencana, rencana jaringan pengelolaan limbah, dan rencana jaringan drainase.

Dari profil wilayah tersebut dapatlah disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis dan permasalahan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta dan Sei Siring (Samarinda) – Tenggarong Seberang akan mendorong pusat kegiatan baru bagi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pengembangan Jalur kereta api pada beberapa titik dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Kautai Kartanegara.
3. Pengembangan Bandar Udara Loa Kulu untuk membantu peningkatan perekonomian daerah ;
4. Pengembangan Kawasan Industri Pendingin dan Loa Kulu yang membantu peningkatan perekonomian daerah ;
5. Masih terdapat konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi berbagai kegiatan lainnya sehingga perlu pembatasan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan ; dan



6. Pengembangan potensi wisata alam dengan tetap memperhatikan pelestarian alam sekitar.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP). Aplikasi kajian cepat KLHS meliputi ;

1. Pelingkup :

Identifikasi *issue* penting melalui rangkaian proses ilmiah/metodologis. Ini diperoleh melalui kegiatan FGD.

2. Kajian Dampak :

Melakukan analisis, perhitungan, stimulasi dampak dan kecenderungannya untuk melihat pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan apakah positif atau negative.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2017-2022) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang
- b. Meningkatkan dokumen perencanaan tata ruang skala rinci
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pertanahan dan penataan ruang.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui Diklat.

2. Strategi W-O

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG Tata Ruang dan pertanahan

3. Strategi S-T

- a. Melakukan sosialisasi rencana Tata Ruang dan Pertanahan



- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang
 - c. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Pemkab.
4. Strategi W-T
- a. Perlu adanya peta-peta tematik
 - b. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pertanahan dan Penataan Ruang
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan ruang dan pertanahan.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi merupakan sebuah harapan, kemana dan bagaimana sebuah organisasi dijalankan agar mampu berkarya secara konsisten dan tetap produktif. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Visi yang juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

Pernyataan Visi di atas bermakna :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak



pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Untuk mendukung terlaksananya Visi tersebut agar sesuai tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menetapkan misi sebagai berikut :

❖ Misi pertama :

Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat

Misi ini mengandung makna sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal tersebut dicapai melalui meningkatnya kapasitas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelayanan publik yang prima dan kondusif.

❖ Misi Kedua :

Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju daya saing daerah



Misi ini mengandung makna sebagai upaya menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan lahan yang sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

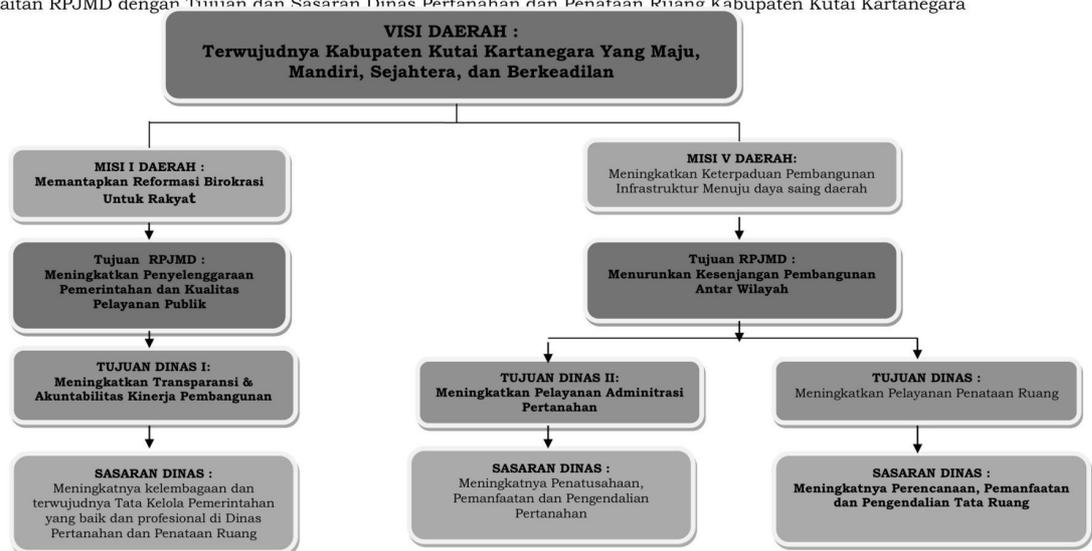
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan tersebut lah maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor – faktor eksternal lainnya.

Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran merupakan salah satu dasar penilaian kinerja sehingga memicu organisasi untuk berupaya se optimal mungkin untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah ini tentunya selaras dengan tujuan dan sasaran yang melekat pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Lima selama kurun waktu lima tahun ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara





Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran tabel 4.2 berikut :



Tabel TC.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Output / Outcomes				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	45	70	75	80	85
2.	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan	1. Meningkatkan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	1. Tertib Administrasi Pertanahan Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	8.70%	54.65%	65%	75%	100%
		2. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang	3. Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	4. Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah	-	-	50%	-	100%



**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan implementasi dari keinginan kuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk menciptakan *Value Added* bagi kualitas layanan kepada para stakeholder dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan berkelanjutan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan berbagai strategi yang dipilih, agar perwujudan tujuan dan sasaran lebih terarah.

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka untuk mewujudkan pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 26 :Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Visi Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
MISI I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berbasis SOP - Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar Beban Kerja - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Kualitas Perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan



MISI II : Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Adminstrasi Pertanahan	Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	Peningkatan Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pelayanan, penataan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian admiistrasi pertanahan- Pelaksanaan Pengadaan dan Legalisasi Tanah- Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pemanfaatan Pengendalian Ruang sesuai dengan arahan tata ruang- Peningkatan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan ruang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

suai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah program-program pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Penambahan program baru karena Penyesuaian Nomenklatur program sesuai dengan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016
2. Penyempurnaan Indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
Program pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	
	Program pengembangan Sistem Informasi pertanahan dan Penataan Ruang	Program Tambahan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang baru
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
Program Pengendalian Tata Ruang		Dihapuskan, karena memiliki indikator capaian yang sama dengan program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang	
-	Program Pemetaan Tata Ruang	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru

Selain penyesuaian program, dalam perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Penataan Ruang juga dilakukan penyederhanaan kegiatan. Pada Renstra sebelumnya terdapat 220 Kegiatan, pada perubahan Renstra menjadi 40 Kegiatan.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan Renstra ini disajikan dalam, pada tabel TC 27 sebagaimana terlampir pada laporan ini :

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan urusan pertanahan dan penataan ruang	Terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan urusan pertanahan dan penataan ruang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	NA	100%	844.875,125	100%	912.980,52	100%	912.980,52	100%	1.223.845,52	100%	1.233.845,52	100%	5.128.527,205	Sekretaris	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon, internet, TV kabel yang terbayarkan	NA	60 rekening	124.868,105	60 rekening	157.200	60 rekening	157.200	60 Rekening	232.120	60 Rekening	242.120	300 rekening	913.508,105	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa pemeliharaan/pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	NA	-	-	-	-	-	-	10 unit	10.000	10 unit	10.000	20 unit	20.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	NA	3 ob	4.526	66 OB	47.863,8	55 OB	47.398,25	168 OB	162.496,8	168 OB	162.496,8	460 OB	424.781,65	Kasubag Umum	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	NA	1 paket	47.752	1 paket	45.000	56 jenis	50.000	56 jenis	75.000	56 jenis	75.000	168 Jenis	292.752	Kasubag Umum	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan 2. Jumlah penggandaan	NA	3 jenis 1 paket	22.571,8	1 paket	10.000	3 jenis 32.500 lembar	10.965,50	4 jenis 35.000 lembar	20.500	4 jenis 35.000 lembar	20.500	11 Jenis 102.500 lembar	84.537,35	Kasubag Umum	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	NA	-	-	-	-	5 jenis	500	5 jenis	500	5 jenis	500	15 jenis	1500	Kasubag Umum	
			Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	NA	-	-	-	-	-	-	5 jenis	1.500	5 jenis	1.500	10 jenis	3.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	NA	191 kotak	16.454,85	100 kotak	12.000	100 kotak Dan 6 jenis	6.000	120 kotak 8 jenis	8.000	120 kotak 8 jenis	8.000	631 kotak 22 jenis	50.454,85	Kasubag Umum	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	NA	3 orang	38.025,65	12 kali	50.000	6 kali	50.000	12 kali	100.000	12 kali	100.000	45 kali	338.025,65	Kasubag Umum	
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honoror	NA	660 OB	590.676,720	660 OB	590.916,720	660 OB	590.916,72	660 OB	590.916,72	660 OB	590.916,72	3300 OB	2.954.343,6	Kasubag Umum	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia	NA	-	-	-	-	-	-	2604 exemplar	7.812	2604 exemplar	7.812	5208 exemplar	15.624	Kasubag Umum	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	Jumlah Kegiatan/Even partisipasi yang diikuti	NA	-	-	-	-	-	-	2	15.000	2	15.000	4	30.000	Kasubag Umum	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	100%	34.525,651	100%	30.000	100%	-	100%	416.229,21	100%	366.229,21	100%	846.984,071	Sekretaris	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	NA	4 unit	34.525,651	-	-	-	-	10 unit	51.229,21	10 unit	51.229,21	20 unit	102.458	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	NA	-	-	-	-	-	-	1 Paket	75.000	1 Paket	75.000	2 Paket	150.000	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	NA	-	-	-	-	-	-	4 Unit	40.000	4 Unit	40.000	8 Unit	80.000	Kasubag Umum	
			Program Pengadaan Mebeuler	Jumlah mebeuler yang tersedia	NA	-	-	-	-	-	-	60 unit	150.000	40 unit	100.000	100 unit	250.000	Kasubag Umum	
			Penyedia Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	NA	-	-	1	30.000	-	-	10 unit	100.000	10 unit	100.000	21 unit	230.000	Kasubag Umum	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/ bagian penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	-	-	-	-	-	-	100%	116.375			100%	116.375	sekretaris	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari tertentu dan atributnya	NA	-	-	-	-	-	-	133 stell	106.400	-	-	133 stell	106.400	Kasub ag Umum	
			Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah Kartu identitas yang dibuat	NA	-	-	-	-	-	-	133 buah	9.975	-	-	133 buah	9.975	Kasub ag Umum	
Tersedian ya SDM Aparatur yang memahami tugas pertanahan dan penataan ruang	Peningkatan Pengetahuan keterampilan dan pelayanan kepada masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	-	-	-	-	-	-			100%	72.500	100%	72.500	sekretaris	
			Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimtek	NA	-	-	-	-	-	-			5 orang	72.500	100%	72.500	Kasub ag kepegawaian	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun-4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan urusan pertanahan dan penataan ruang	Terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan urusan pertanahan dan penataan ruang		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (LKJIP)	NA	LKJIP E	-	LKJIP C	-	LKJIP C	140.349	LKJIP B	68.000	LKJIP B	68.000	LKJIP B	276.349	Sekretaris	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	NA	-	-	-	-	6 dokumen	70.000	6 dokumen	52.000	6 dokumen	52.000	18 dokumen	174.000	Kasubag Program dan keuangan	
			Pengembangan data dan informasi	Tersedianya Website yang berisi informasi Perencanaan dan Pelayanan	NA	-	-	-	-	4 jenis data 2 kegiatan publikasi	70.349,985	1 paket	16.000	1 paket	16.000	3 kegiatan	102.349,985	Kasubag Program dan kasi pengembangan data dan informasi	
Meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pembangunan melalui	Tersedianya data/informasi pertanahan dan pemanfaatan		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tingkat Ketersediaan data Pembangunan di Bidang	NA	-	-	-	-	-	-	1 paket	85.000	1 paket	85.000	2 paket	170.000	Sekretaris	

BAB VI

pembangunan informasi pertanahan		ruang berbasis teknologi	dan Tata Ruang	Tata Ruang	Pertanahan dan Penataan Ruang														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tanah dan Ruang	Tersedianya aplikasi sistem informasi tanah dan ruang	NA	-	-	-	-	-	-	1 paket	85.000	1 paket	85.000	2 paket	170.000		Kasubag Program dan keuangan dan kasi pengembangan data dan informasi
Tertibnya adm.pertanahan/pegunaan dan penguasaan tanah	Tersedianya data administrasi pertanahan secara lengkap dan teratur		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Cakupan tertib administrasi Penguasaan Tanah	NA			100%	209.994,3	100%	141.744,015	100%	540.000	100%	540.000	100%	1.431.783,31		Kabid pengadaan dan kabid sengketa pertanahan
			Fasilitasi Aset Perumahan	Jumlah Sertifikat	NA	-	-	100 sertifikat	75.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000		
			Pembinaan dan pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/De	Jumlah peserta pembinaan administrasi pertanahan	NA	-	-	546 SKPT	134.994,3	546 SKPT	141.744,015	35 orang	140.000	35 orang	140.000	70 orang	556.738,315		Kasi pembinaan dan pengendalian adm.pertanahan

BAB VI

			sa Pendampingan penerbitan SKPT (Luas Batas Maksimum dibawah Ha)	Jumlah SKPT	NA	-	-	-	-	-	35 SKPT	100.000	40 SKPT	100.000	75 SKPT	200.000	Kasi pembinaan dan pengendalian
--	--	--	--	-------------	----	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun-4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemenuhan Alas Hak atas tanah Pemda	Jumlah Dokumen alas hak yang terverifikasi	NA	-	-	-	-	-	8 dokumen	125.000	8 dokumen	125.000	16 dokumen	250.000	Kasi data dan informasi		
			Penyediaan Peta Penggunaan Tanah dan Foto Udara Desa/Kecamatan	Jumlah Peta yang dikeluarkan	NA	-	-	-	-	-	4 Lawyer	75.000	4 Lawyer	75.000	8 Lawyer	150.000	Kasi.p enatag unaan tanah		
			Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Tata Ruang	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	NA	-	-	-	-	-	5 kecamatan	100.000	5 kecamatan	100.000	10 kecamatan	200.000	Kasi penyuluhan		
Terlaksananya Penataan, Penguasaan, pemilikan dan pengguna	Terseleenggaranya fasilitasi perencanaan, penggunaan tanah dan tertib		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	NA	8,7 %	-	12,5 %	6.675.000	29,4 %	8.350.000	35,29%	3.350.000	15,29%	3.350.000	100%	9.625.000	Kabid dan Kabid pengadaan Lahan	PPHT

BAB VI

an dan pemanfaatan tanah	administrasi penguasaan, pemilikan penggunaan tanah	tanah	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Sertifikat	NA	-	-	67 sertifikat	100.000	400 sertifikat	2.500.000	480 sertifikat	3.000.000	480 sertifikat	3.000.000	1.360 sertifikat	8.500.000	Kasi penguatan hak atas tanah
--------------------------	---	-------	---	-------------------	----	---	---	---------------	---------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peningkatan Legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Persil	NA	-	-	NA	-	320 persil	350.000	320 persil	350.000	320 persil	350.000	960 persil	1.050.000	Kasi penguatan hak	
			Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah pengadaan tanah yang terlaksana	NA	-	-	28 Ha	6.500.000	-	5.500.000	-	-	-	-	12.000.000		Kasi pengadaan tanah	
Terfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	Terselesaikannya masalah pertanahan		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		64,29%	-	100%	75.863,8	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	825.863,8	Kabid Sengketa dan Kabid PPHT	
			Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan yang terfasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan	NA	-	-	-	-	2 kec	150.000	2 kec	150.000	2 kec	150.000	6 kec	450.000	Seksi penataan tanah	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun-4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah Kasus yang terfasilitasi	NA	-	-	10 kasus	75.863,8	13 kasus	100.000	13 kasus	100.000	13 kasus	100.000	49 kasus	375.863,8	Kasi penyelesaian sengketa	
Terselenggaranya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkualitas serasi, selaras, dan sesuai RTRW	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten		Program Perencanaan Tata Ruang	1. Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun 2. Persentase Kecamatan yang memiliki RDTR 3. Ada Tidaknya Dokumen RTRW	NA	1 Dok	203.670,35	1 Dok	370.000	1 dok	200.000	1 dok	900.000	1 dok	1.900.000	1 dok	4.000.000	Kabid Tata Ruang	
			Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Revisi Perda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	NA	1 Dok	203.670,35	1 Dok	370.000	1 dok	200.000	-	-	-	-	1 Dok	773.670,35	Kasi perencanaan Tata Ruang	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun -4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/b agian penanggung jawab	Loka si
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan dan KLHS	Jumlah Dokumen Substansi RDTR Kecamatan	NA	-	-	-	-	-	-	2 dok	600.000	4 dok	1.600.000	4 dok	1.600	Kasi perencanaan Tata Ruang	
			Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai kartanegara	Jumlah Fasilitasi yang dilakukan	NA	-	-	-	-	-	-	20 kali	300.000	20 kali	300.000	40 kali	300.000	Kasi perencanaan Tata Ruang	
Terselenggara pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkualitas serasi, selaras,se sesuai RTRW	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan RDTR	NA	-	-	-	-	-	-	5 kec	200.000	5 kec	200.000	10 kec	400.000	Kabid Tata Ruang	
			Fasilitasi dan identifikasi pertimbangan teknis Pmanfaatan ruang dan pelanggaran ruang	Terpantaunya pemanfaatan dan pelanggaran ruang	NA	-	-	-	-	-	-	5 kec	200.000	5 kec	200.000	10 kec	400.000	Kasi. Oemanfaatan dan pengendalian ruang	

BAB VI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun 3 2019		Tahun-4 2020		Tahun-5 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit/bagian penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tersedianya informasi pengguna an tanah yang berupa data dan peta untuk berbagai kegiatan dalam perumusan kebijakan pembangu nan	Tersedianya pemetaan dan pemutakhir an peta pengguna an tanah dan penataan ruang, pengempab angan sistem geografis pertanahan dan penataan ruang		Program Pemetaan Tata Ruang	Rasio kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit atau survei foto udara terhadap luasan rencana Tata Ruang	NA	-	-	-	-	-	-	10%	400.000	10%	400.000	20%	800.000	Kabid Tata Ruang	
			Pemetaan Penggunaan Lahan	Rasio kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit	NA	-	-	-	-	-	-	10%	400.000	10%	400.000	20%	800.000	Kasi Pemet aan Ruang	



BAB VII
PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara guna memenuhi tuntutan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perencanaan Pembangunan dan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjadi pelaksanaan pencapaian target, Visi dan Misi RPJMD 2016-2021.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya.

Kepala Dinas

Drs. H. Muhammad Syaifuddin

Pembina Utama Muda/IV C
NIP 19590808 199303 1 004

**KERTAS KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DARAH 2016-2021
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Strategy	Arah Kebijakan	No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Cara Perhitungan indikator hasil (outcome) Program/Kegiatan	Existing	Target				Akhir Periode		Penanggung Jawab	Keterangan		
							2016	2017*		2021		K	Rp			K	Rp
								K	Rp	K	Rp						
No	Strategy	Arah Kebijakan	1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja								Kepala Dinas	Tujuan			
Sasaran 1: Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			1.1.	Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Diperoleh dari penilaian Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	NA	45		85		85		Kepala Dinas	Sasaran		
1	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berbasis SOP	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah layanan yang seharusnya x 100 %	NA	100	856,849,475	100	2,087,857,520	100	7,332,977,059	Sekretaris	Program		
			1.1.1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan dibagi jumlah rekening yang ada x 100%		60	124,868,105	60	242,120,000	300	916,158,459	Kasubag Umum			
			1.1.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pemeliharaan dibagi jumlah kendaraan dinas yang tercantum dalam KIB x 100%				10	75,000,000	20	150,000,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan dibagi dengan laporan keuangan yang seharusnya disusun dikalikan 100%		3	4,526,000	228	308,248,800	753	977,136,200	Kasubag Umum			
			1.1.1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Jumlah ATK yang tersedia dibagi total kebutuhan Atk dalam 1 tahun x 100%		48	47,752,000	60	120,000,000	274	387,752,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak yang Tersedia 2. Jumlah Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100% Jumlah penggandaan yang terbayarkan dibagi total penggandaan x 100%		3	22,571,800	4	20,000,000	18	83,537,350	Kasubag Umum			
			1.1.1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Jumlah perlengkapan komponen instalasi listrik yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan instalasi listrik dalam 1 tahun x 100%				5	2,500,000	15	5,500,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100%				2604	7,812,000	5208	15,624,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan bahan logistik dalam 1 tahun x 100 %				5	1,500,000	10	3,000,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.9	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia 2. Jumlah Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan dalam 1 tahun x 100%		191	16,454,850	120	15,000,000	631	58,454,850	Kasubag Umum			
			1.1.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan x 100%		3	50,000,000	12	300,000,000	51	802,000,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.11	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honoror	Jumlah tenaga honoror yang terbayarkan dibagi jumlah tenaga honoror yang tersedia x 100%		660	590,676,720	660	590,676,720	3300	2,953,383,600	Kasubag Umum			
			1.1.1.12	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan pekerjaan dibagi jumlah peralatan kerja yang dimiliki x 100%				2	25,000,000	4	45,000,000	Kasubag Umum			
			1.1.1.13	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Perlengkapan Kegiatan	Jumlah perlengkapan hari tertentu yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan yang direncanakan x 100%				10	30,000,000	10	30,000,000	Kasubag Umum			

		1.1.1.14	Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran	Jumlah Pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti			2	100,000,000	4	200,000,000	Kasubag Umum		
		1.1.1.15	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan x 100%			35	250,000,000	112	705,430,600	Kasubag Umum		
2	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standar beban kerja	1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana kantor yang ada x 100%			100	34,525,651	100	410,000,000	100	1,599,525,651	Sekretaris
		1.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah luasan gedung dalam kondisi baik dibagi jumlah luasan gedung yang ada dikali 100%			1	100,000,000	2	175,000,000	Kasubag Umum		
		1.1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Jumlah luasan Gedung yang direhab dibagi jumlah luasan kantor x 100%			0	-	1	550,000,000			
		1.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pembelian BBM (jumlah liter)	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh kendaraan dinas yang tercatat di KIB x 100%			10		34		Kasubag Umum		
								4	34,525,651	4000	100,000,000	12054	304,525,651	Kasubag Umum
		1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelih	Jumlah peralatan gedung yang tercatat di KIB dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh peralatan gedung yang tercantum di KIB x 100%			20	40,000,000	40	80,000,000	Kasubag Umum		
		1.1.2.4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Jumlah Mebeleur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan mebeleur yang dibutuhkan x 100 %			40	100,000,000	175	350,000,000	Kasubag Umum		
		1.12.5	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan telepon	Jumlah pemeliharaan jaringan, instalasi air, listrik dan telepon yang dipelihara				1	70,000,000	2	140,000,000			
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata Capaian Nilai SKP ASN dibagi jumlah ASN x 100%			100	106,400,000	100	106,400,000	106,400,000	Sekretaris	
		1.1.3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu dan	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia dibagi jumlah pegawai x 100%			133	106,400,000	133	106,400,000	Kasubag Umum		
		1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia dibagi jumlah pegawai x 100%					156	145,470,000	Kasubag Umum		
		1.1.3.3	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah Kartu Identitas yang dibuat	Jumlah kartu identitas pegawai yang tersedia dibagi jumlah pegawai x 100%					133	25,000,000	Kasubag Umum		
		1.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya x 100%			100	170,000,000	100	170,000,000	340,000,000	Sekretaris	
		1.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan bimbingan/pendidikan/pelatihan yang dilakukan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan/pendidikan/pelatihan dibagi jumlah ASN yang dijadwalkan untuk melakukan bimbingan/pendidikan/pelatihan			10	150,000,000	20	300,000,000	Kasubag Kepegawaian		
		1.1.4.2	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat waktu x 100%			8	20,000,000	16	40,000,000	Kasubag Kepegawaian		
4	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan	1.1.5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP (hasil pemeriksaan inspektorat)	Nilai LKJIP (hasil pemeriksaan inspektorat)			27.54	-	70	101,000,000	70	528,668,511	Sekretaris
		1.1.5.1	Fasilitasi penyelesaian kewajiban Pihak ketiga	Jumlah kewajiban yang terbayarkan	Jumlah kewajiban yang terbayarkan dibagi jumlah kewajiban yang tertera dalam Laporan keuangan x 100%					4	225,449,050	Kasubag Peny. Program dan Keuangan		
		1.1.5.2	Penyusunan buku profile SKPD	Jumlah buku profil yang diterbitkan	Buku Profil yang dihasilkan dibagi jumlah seluruh buku profil x 100%			70	25,000,000	70	25,000,000	Kasubag Peny. Program dan Keuangan		
		1.1.5.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%			9	52,000,000.00	27	190,000,000	Kasubag Peny. Program dan Keuangan		

--	--	--

No	Strategy	Arah Kebijakan
----	----------	----------------

Sasaran 2 : Meningkatkan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan

2 Peningkatan Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

5 Peningkatan pelayanan, penataan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian administrasi pertanahan'

6 Pelaksanaan Pengadaan dan Legalisasi Tanah

7 Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Kutai kartanegara

1.1.5.5	Penyusunan Data dan Informasi	Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang	Jumlah jenis informasi yang di update di website dibagi jumlah jenis informasi yang seharusnya di update x 100%			4	24,000,000	12	88,219,461	Kasabag Peny. Program dan Keuangan
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah									
2	Meningkatnya Tertib Pengelolaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertib Administrasi Pertanahan								Kepala Dinas
2.1	Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan	Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Kepuasan Desa/Kelurahan/Kecamatan tentang pelayanan SKPT oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	8.70%		100%				Kepala Dinas
2.1.2.	Program Penataan Penguasaan, pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Tertib administrasi penguasaan tanah	Indeks Kepuasan Desa/Kelurahan/Kecamatan tentang pelayanan SKPT oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	8.7		80.00	14,250,000,000.00	80		Kabid Pengadaan tanah dan pembinaan administrasi
2.1.2.1	Pembinaan, pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi 2. Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan	Jumlah akumulasi desa/kelurahan/kecamatan terlayani dibagi jumlah desa/kelurahan/kecamatan di Kab.Kukar x 100%			18	350,000,000	99	976,738,315	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Adm. Pertanahan
2.1.2.3	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Persentase Tersedianya Database Pertanahan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan di Kab.Kukar x 100%			18.56%	200,000,000			Kasi data dan informasi
		2. persentase penyelesaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang masuk x 100%							Kabid Pengadaan tanah dan pembinaan administrasi
2.1.2.3	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Luas Lahan yang dibebaskan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi jumlah permohonan luas lahan yang masuk untuk dibebaskan x 100 %			10	10,000,000,000	54	34,000,000,000	Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah
		3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Jumlah luas Lahan Pemda yang bersertifikat dibagi luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat x 100 %							Kabid Penatgunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
2.1.2.5	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Persil	Jumlah Persil Tanah yang diselesaikan dibagi jumlah Persil yang tidak lanjut sampai proses sertifikat x 100 %			480	3,000,000,000	1,440	10,203,215,440	Kasi Penguatan Hak atas tanah
2.1.2.6	Peningkatan Legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Persil	Jumlah Persil Tanah yang memenuhi syarat sertifikasi dibagi jumlah persil tanah yang diidentifikasi x 100 %			320	350,000,000	890	1,050,000,000	Kasi Penguatan Hak atas tanah
2.1.2.7	Fasilitasi Sertifikasi Aset Perumahan	Jumlah Persil	Jumlah persil yang dapat diterbitkan sertifikat dibagi jumlah permohonan(persil) yang terdaftar x 100 %					100	75,000,000	Kasi Penguatan Hak atas tanah
2.1.2.8	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah kecamatan	Jumlah kecamatan yang selesai terfasilitasi dibagi jumlah kecamatan yang terdaftar dalam kawasan hutan x 100 %			3	150,000,000	9	450,000,000	Kasi Penatgunaan Tanah
2.1.2.9	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia			6	200,000,000	11	350,000,000	Kasi data dan Pemetaan Tematik
2.1.3.	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi dibagi jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan dikali 100 %	64		90	1,450,000,000	90	875,863,800	Kabid Sengketa Tanah
2.1.3.1	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah permohonan kasus/sengketa	Jumlah kasus yang difasilitasi dibagi jumlah permohona kasus x 100%	6		13	350,000,000	55	875,863,800	Kasi pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan
2.1.1.5	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi hukum pertanahan	Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi pertanahan yang dilakukan dibagi jumlah penyuluhan/penyampaian informasi hukum pertanahan			18	400,000,000	36	750,000,000	Kasi Penyuluhan Pertanahan
2.1.1.6	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dibagi jumlah perkiraan kasus dikali 100%			18	400,000,000	36	750,000,000	Kasi advokasi dan pengendalian sengketa

				2.1.1.7	Penyusunan materi dampak sosial ekonomi atas penguasaan tanah di areal perkebunan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah Dokumen materi yang diselesaikan											Kasi Penyuluhan Pertanian	
				2.1.1.8	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah materi teknis yang diselesaikan			1	300,000,000		1	500,000,000				Kasi advokasi dan pengendalian sengketa	
No	Strategy	Arah Kebijakan		3	Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang	Kesesuaian Pembangunan Wilayah Sesuai dengan Arah Tata Ruang												Kepala Dinas	
Sasaran 3 : Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang																			
3	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	8	Peningkatan Pemanfaatan, Pengendalian Ruang sesuai dengan arahan tata ruang	3.1	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah RDTR yang disusun/diterbitkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%			-		1		38				Kepala Dinas	
				3.1.1	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah	Jumlah RDTR yang disusun/diterbitkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%			-	203,670,350	100		1,000,000,000	100	29,273,670,350		Kabid Tata Ruang	7,500,000,000
				3.1.1.1	Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RTRW	Jumlah Dokumen			-	203,670,350	1		300,000,000	1	1,473,670,350		Kasi Perencanaan Tata Ruang	
				3.1.1.2	Penyusunan Materi Teknis RDTR Kec.Loa Kulu	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Materi Teknis/ RDTR Sesuai Permen PU (Akumulasi)								1	800,000,000		Kasi Perencanaan Tata Ruang	
				3.1.1.3	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RDTR	Jumlah Dokumen RDTR dan KLHS sesuai Permen PU								34	24,900,000,000		Kasi Perencanaan Tata Ruang	
				3.1.1.4	Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Sempadan Bangunan Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Garis Sempadan Jalan dan Sempadan Bangunan	Jumlah Dokumen Garis Sempadan Jalan dan sempadan bangunan								1	1,500,000,000		Kasi Perencanaan Tata Ruang	
				3.1.1.5	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi	Jumlah fasilitasi yang dilakukan					20		300,000,000	40	600,000,000		Kasi Perencanaan Tata Ruang	
				3.1.1.6	Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RTDR yang dilakukan					4		400,000,000					
					Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang									300,000,000					
				3.2.2.2	Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk utilitas terpadu kota Tenggarong	Dokumen Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen yang disusun								1	1,000,000,000		Kasi Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	
				3.2.2.3	Kajian Pemukiman Diatas Air Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen Kajian Pemukiman Di atas Air	Jumlah dokumen yang disusun								1	1,000,000,000		Kasi Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	
				3.2.2.4	Update Tata Guna Lahan	1. Dokumen Updating Tata Guna Lahan 2. Jumlah Peta Pemanfaatan Ruang	1.Jumlah Dokumen yang disusun 2. Jumlah Peta pemanfaatan ruang yang dikeluarkan					50		300,000,000	101	1,600,000,000		Kasi Pemetaan dan Tata Ruang	